

**ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH TERKAIT PEMBANGUNAN  
FLYOVER DI JALAN WIRATNO TERHADAP ASAS *GOOD*  
GOVERNANCE**

Oleh  
**MUHAMMAD RAYHAN NOVA RAMADHAN**  
**NIM. 2205010121**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah dalam pembangunan Flyover Jalan Wiratno di Kota Tanjungpinang ditinjau dari penerapan asas *Good Governance*. Pembangunan flyover merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah yang dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan konektivitas transportasi, mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, serta menunjang pengembangan kawasan perkotaan dan pusat pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan pembangunan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta telah mengikuti mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penerapan prinsip *Good Governance*, pemerintah juga telah mengupayakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan, terutama dalam meningkatkan komunikasi publik, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta penguatan partisipasi masyarakat yang terdampak secara langsung agar tujuan pembangunan dapat dipahami secara menyeluruh. Selain itu, penyempurnaan mekanisme kompensasi yang berkeadilan terhadap masyarakat terdampak juga perlu terus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa legalitas kewenangan pemerintah dalam pembangunan Flyover Jalan Wiratno telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan optimalisasi penerapan prinsip *Good Governance* secara berkelanjutan diharapkan semakin meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur, memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, serta memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Kata kunci:** Pembangunan *Flyover*, Asas *Good Governance*, Partisipasi Publik, Kewenangan Pemerintah, Legitimisasi Sosial.

***ANALYSIS OF GOVERNMENT AUTHORITY RELATED TO THE  
CONSTRUCTION OF THE FLYOVER ON WIRATNO STREET IN  
ACCORDANCE TO THE PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE***

**By  
MUHAMMAD RAYHAN NOVA RAMADHAN  
NIM. 2205010121**

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the government's authority regarding the construction of the Jalan Wiratno Flyover in Tanjungpinang City, viewed through the lens of Good Governance principles. The flyover project is a local government initiative designed to enhance transport connectivity, facilitate the smooth mobility of the public, and support the development of urban areas and the government administrative hub in the Riau Islands Province. This study employs a qualitative research method. Data were gathered through interviews with relevant government agencies and affected community members, and supplemented by a review of legislation and documents related to infrastructure development. The findings indicate that the government carried out the construction based on the authority granted by Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and adhered to the applicable planning, budgeting, and implementation mechanisms. Regarding Good Governance, the government endeavored to uphold transparency, accountability, and public participation through regional development planning mechanisms. However, the study reveals areas requiring optimization specifically in improving public communication, information dissemination, and the engagement of directly affected communities to ensure a comprehensive understanding of the project's objectives. Furthermore, the compensation mechanisms for affected residents need to be continuously refined to ensure fairness and compliance with statutory regulations. In conclusion, the government's exercise of authority in the Jalan Wiratno Flyover project aligns with prevailing legal provisions; meanwhile, the continued optimization of Good Governance principles is expected to enhance infrastructure development effectiveness, deliver broader public benefits, and strengthen the quality of local governance.*

***Keywords:*** *Flyover Construction, Principles of Good Governance, Public Participation, Government Authority, Social Legitimacy.*